



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ALIM ISNANSETYO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN PERIKANAN
3. NHK : 814481

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.014.496.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 412 m <sup>2</sup> /100 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 244.628.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m <sup>2</sup> /100 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 244.836.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m <sup>2</sup> /66 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 96.632.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m <sup>2</sup> /45 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 428.400.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>228.000.000</b>
1. MOBIL, NISSAN MPV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU DAIHATSU ROCKY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.050.000</b>



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	834.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	280.000.000
Sub Total	Rp.	2.369.546.000
III. HUTANG	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.369.546.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.